

RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2026

**Jl. Besar Perupuk Dusun V
Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2026.

Rencana kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dalam RENJA–OPD tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun. Dalam melaksanakan RENJA–OPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal, pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

RENJA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 menggambarkan rencana kerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2025. Rencana Kerja merupakan sasaran yang ingin dicapai selain diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam tahun 2026, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara



Muliadi, SE
Pembina/ IV.a
NIP. 19750815 201001 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU 6	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Batubara..	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara	18
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja KPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial PPPA	33
3.3 Usulan Program dan Kegiatan.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	46
PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamantkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam waktu 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek atau 1 (satu) tahunan (RKPD).

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 adalah merupakan rencana tahunan yang berjangka 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memiliki kejelasan urutan waktu pengalokasian suatu sumber daya (untuk memenuhi suatu kebutuhan) mana sumber daya yang dialokasikan tahun pertama, kedua dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu tersebut serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal.

Isu penting dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batu Bara tetap pada penanganan permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berbagai program pemerintah terus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, namun jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum dapat diturunkan secara signifikan, dan pada kenyataannya terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan jumlah atau persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada beberapa tahun terakhir ini ternyata disebabkan oleh jumlah penduduk miskin yang terdiri dari mereka yang

kurang keberdayaannya, sehingga memerlukan upaya peningkatan dalam penanganan permasalahan tersebut.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara menetapkan Rencana Kerja Tahun 2026 yang berisi tujuan, sasaran serta pencapaian tujuan dengan melalui kebijakan program dengan tetap memperhitungkan potensi dan kendala serta mengantisipasi tuntutan perkembangan masa depan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2025 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
 13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 I-6 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040;
 18. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

19. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikator dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L, dan Renja Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBDD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah.

- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat daerah.
 - 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA**
Mengambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Sebelumnya
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V PENUTUP**
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 dan Rencana Program/Kegiatan tahun 2026. Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2026 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2024. Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara difokuskan pada pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2024 diuraikan menurut kegiatan dengan mengukur capaian indikator outputnya. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Batu Bara. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024 s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	NILAI AKIP	75,00		73,00	71,3	97,67	73	144,3	192,40
06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27		9	9	100	9	18	66,67
06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6		2	2	100	2	4	66,67
06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21		7	7	100	7	14	66,67
06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100		100	100	100	100	200	200,00
06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102		30	29	97	29	58	56,86

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024 s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3		1	1	100	1	2	66,67
06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36		12	12	100	12	24	66,67
06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3		12	12	100	1	13	433,33
06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135				-	1	1	0,74
06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3				-	1	1	33,33
06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3				-	1	1	33,33
06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	300		88	75	85	65	140	46,67
06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36				-	12	12	33,33
06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	3		1	1	100	1	2	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024 s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3		1	1	-	1	2	66,67
06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36		12	12	100	12	24	66,67
06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36				-	0	0	-
06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36		12	12	100	12	24	66,67
06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14				-	0	0	-
06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36		12	12	100	12	24	66,67
06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36		12	12	100	12	24	66,67
06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3		1	1	100	1	2	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024 s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	111		44	44	100	38	82	73,87
06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6				-	1	1	16,67
6,02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	JUMLAH POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG MENGIKUTI PROGRAM PEMBERDAYAAN	39		13	13	100	13	26	66,67
06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti program pemberdayaan	39		13	13	100	12	25	64,10
06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	36		12	12	100	12	24	66,67
06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3		1	1	100	1	2	66,67
6,04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	50		50,00	50,00	100,00	50	100	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024 s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50		50,00	50,00	100,00	50	100	200,00
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6954		500	500	100	0	500	-
06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	750		0	0	-	0	0	-
06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	281		7	3	42,86	127	130	46,26
06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45000		10908	10908	100	15024	25932	57,63
06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	300				-	0	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024 s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300				-	0	0	-	
06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya yang memperoleh bantuan sosial	50			50,00	50,00	100	50	100	200,00
06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000				-	0	0	-	
06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	8000			6688	6688	100	0	6688	83,60
06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	600			2000	2000	100	1405	3405	567,50
6,05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	JUMLAH ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG DIJANGKAU	20000			71	71	100,00	73	144	0,72
06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang dijangkau	20000					-	0	0	-
06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1000					-	0	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024 s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	19000		71	71	100	0	71	0,37
6,06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE MASYARAKAT KORBAN BENCANA MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	300		100	100	100	100	200	66,67
06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	300		100	100	100	100	200	66,67
06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300		100	56	56,00	90	146	48,67
06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	78		26	26	100,00	26	52	66,67
06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	78	0	26	26	100,00	26	52	66,67
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Terlaksananya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	79,06		79,06	79,06	100	80	159,06	201,19

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024 s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3		1	1	100	1	2	66,67
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	90		30	30	100	30	60	66,67
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	36		1	1	100	1	2	5,56
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3		1	1	100	1	2	66,67
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	36		12	12	100	12	24	66,67
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan layanan	140		40	64	160	40	104	74,29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024 s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Menerima Layanan Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	140		40	64	160	40	104	74,29
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	140		40	64	160	40	104	74,29
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak	45		61	61	100	80	141	313,33
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Yg mendapat pelatiha KHA	45		1	1	100	15	16	35,56
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada rganisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	45		15	15	100	15	30	66,67

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penerapan SPM bidang Sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial yang harus diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota.

Untuk lebih jelas, capaian SPM Bidang sosial dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

No	Indikator	Satuan	Capaian Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;	%	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;	%	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;	%	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	%	100	100	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.	%	100	100	100	100

Selain SPM, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melaksanakan pembangunan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran OPD. Adapun Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	Orang	270	270	100
		Persentase Angka Kemiskinan	%	11,03	10,94	100,82
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	73,00	71,3	97,67
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	2,79	3,69	75,55
4	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	22,00	45,29	48,57
		Persentase Pencapaian Indikator KLA	%	70,00	82,10	117,29

Dari data tabel diatas, dapat diuraikan realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Nilai AKIP OPD, dengan capaian 71,30 (BB).
- b. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri, dengan capaian 270 orang.
- c. Persentase Angka Kemiskinan, dengan capaian 10,94 %
- d. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, dengan capaian 3,69:100.000
- e. Rasio Kekerasan terhadap anak, dengan capaian 45,29: 100.000
- f. Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak, dengan capaian 82,10 %

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara berkewajiban dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berikut disajikan kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2024

Tabel 2.4
Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	-
2	Anak Terlantar	28 Orang
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	64 Orang
4	Anak Jalanan	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas	218 Orang
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	132 Orang
9	Penyandang Disabilitas	1,129 Orang
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	1 Orang
12	Pengemis	11 Orang
13	Pemulung	52 Orang
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) (BWBLP)	48 Orang
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1 Orang
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	5 Orang
18	Korban Trafficking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	6 Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-
21	Korban Bencana Alam	85 Orang
22	Korban Bencana Sosial	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE/WARSE)	2.834 Orang
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	8 Orang
25	Komunitas Adat Terpencil	-
26	Fakir Miskin	58.810 KK
	JUMLAH	63.660

Sumber: Dinas Sosial PPPA

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sangat ditentukan oleh berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi proses pelayanan rehabilitasi sosial. Faktor-faktor tersebut berupa isu-isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, antara lain :

1. Perlu pengawasan dan pembinaan komprehensif terhadap anak terlantar, gelandangan dan pengemis penduduk Kabupaten Batu Bara dan luar Kabupaten Batu Bara.
2. Penyaluran permakanaan terhadap lanjut usia dilaksanakan secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kemampuan SDM dalam penanganan bencana dan pasca bencana.
4. Memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pengarusutamaan gender.
5. Pelatihan keterampilan bagi perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.
6. Memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Melakukan kampanye pencegahan pernikahan usia anak.
8. Melakukan sosialisasi dan pembentukan sekolah ramah anak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Masih banyaknya anak terlantar, gelandangan dan pengemis penduduk Kabupaten Batu Bara dan luar Kabupaten Batu Bara.
2. Masih kurangnya pendampingan dan fasilitasi terhadap lanjut usia miskin dan rentan miskin.
3. Masih kurangnya keterampilan SDM dalam penanganan bencana dan pasca bencana.
4. Kurangnya implementasi tentang kesetaraan gender.
5. Rendahnya keterampilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
6. Masih tingginya kekerasan terhadap anak.
7. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
8. Belum semua sekolah termasuk kategori ramah anak.

Permasalahan tersebut di atas dapat diberikan solusi dengan upaya-upaya berikut:

1. Penanganan permasalahan sosial dengan menggunakan skala prioritas.
2. Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan.
3. Optimalisasi proses perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.
4. Melibatkan peran aktif masyarakat, orsos, ormas, pihak swasta dan pihak-pihak peduli terhadap pembangunan bidang sosial.

2.4. Review Terhadap Rancangan OPD

Dari Rancangan yang telah disusun pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja dinas. Rencana kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPd TAHUN 2026
KABUPATEN BATU BARA

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			Target		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6		7
1.6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	6.210.823.423	100	%	6.210.823.423
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	dokumen	18.700.000	9	dokumen	18.700.000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	9.350.000	2	dokumen	9.350.000
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	dokumen	9.350.000	7	dokumen	9.350.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100	%	3.847.609.811	100	%	3.847.609.811
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang	3.839.659.811	30	Orang	3.839.659.811
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	7.950.000	1	Laporan	7.950.000
1.1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100	%	110.000.000	100	%	110.000.000
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60	Stell	60.000.000	60	Stell	60.000.000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			Target		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6		7
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	orang	50.000.000	5	orang	50.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan	768.550.000	12	bulan	768.550.000
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	24.920.000	1	paket	24.920.000
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	271.640.000	1	paket	271.640.000
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	45.000.000	1	paket	45.000.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	23.190.000	1	paket	23.190.000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	80	dokumen	108.000.000	80	dokumen	108.000.000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	295.800.000	12	laporan	295.800.000
1.06.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	1	unit	72.960.000			72.960.000
1.06.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	72.960.000	1	unit	72.960.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	1.005.623.612	12	bulan	1.005.623.612
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	laporan	174.940.412	12	laporan	174.940.412

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7		
		Listrik yang Disediakan						
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	830.683.200	12	laporan	830.683.200
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	387.380.000	12	bulan	387.380.000
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	38.420.000	1	unit	38.420.000
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	unit	248.960.000	30	unit	248.960.000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	100.000.000	2	unit	100.000.000
1.6.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Soial (PSKS) yang mengikuti program pemberdayaan	12	orang	601.471.000	12	orang	601.471.000
06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti program pemberdayaan	12	orang	601.471.000	12	orang	601.471.000
1.06.02.2.03.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10	LKS	153.040.000	10	LKS	153.040.000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			Target		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6		7
1.06.02.2.03.14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	orang	288.000.000	12	orang	288.000.000
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	12	orang	160.431.000	12	orang	160.431.000
1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50	%	3.190.633.000	50	%	3.190.633.000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50	%	2.138.738.000	50	%	2.138.738.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	orang	584.600.000	200	orang	584.600.000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	127	orang	154.800.000	127	orang	154.800.000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5161	orang	1.399.338.000	5161	orang	1.399.338.000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4		5	6		7
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya yang memperoleh bantuan sosial	50	%	1.051.895.000	50	%	1.051.895.000
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	322	orang	1.051.895.000	322	orang	1.051.895.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah anak terlantar dan fakir miskin yang dijangkau	1042	Orang	1.479.435.000	1042	Orang	1.479.435.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang dijangkau	1042	Orang	1.479.435.000	1042	Orang	1.479.435.000
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	42	orang	137.928.000	42	orang	137.928.000
1.06.05.2.02.06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	orang	1.341.507.000	1000	orang	1.341.507.000
1.6.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat pkorban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	%	888.695.000	100	%	888.695.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	%	264.830.000	100	%	264.830.000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			Target		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6		7
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300	orang	264.830.000	300	orang	264.830.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	26	orang	623.865.000	26	orang	623.865.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26	orang	623.865.000	26	orang	623.865.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Terlaksananya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100	%	613.515.940	100	%	613.515.940
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	145.004.000	100	%	145.004.000
2.08.02.2.02.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30	OPD	145.004.000	30	OPD	145.004.000
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapat bimbingan teknis, serta peningkatan kualitas SDM lembaga	1	lembaga	468.511.940	1	lembaga	468.511.940

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			Target		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6		7
2.08.02.2.03.07	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1	lembaga	106.150.000	1	lembaga	106.150.000
2.08.02.2.03.08	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	5	kerjasama	362.361.940	5	kerjasama	362.361.940
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase korban perempuan dan anak yang mendapatkan layanan sesuai standar			261.410.200			261.410.200
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	1	Lembaga	261.410.200	1	Lembaga	261.410.200
2.08.04.2.02.07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1	Lembaga	261.410.200	1	Lembaga	261.410.200
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Capaian Nilai Indikator Kabupaten Layak Anak	80	Nilai	438.700.950	80	Nilai	438.700.950
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	100	%	438.700.950	100	%	438.700.950
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada	15	Organisasi	438.700.950	15	Organisasi	438.700.950

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	
	Kabupaten/Kota	rganisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					
	JUMLAH				13.684.684.513		13.684.684.513

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial sangatlah membutuhkan perencanaan yang terencana, terukur dan terarah, dan hal ini telah dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

Untuk itu juga diperlukan pemetaan pendataan dan penelaahan yang dilakukan dalam satu tahun berjalan untuk dijadikan bahan perbandingan maupun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan.

Adanya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang cukup dan akurat adalah merupakan dasar penyusunan program dan kegiatan untuk tahun bersangkutan dan berhubungan dengan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Batu Bara maupun APBD Provinsi Sumatera Utara atau dana dari APBN.

Dukungan partisipatif dari berbagai pihak dan organisasi sosial lainnya, seperti pelaku usaha, Orsos, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Forum Komunikasi Lanjut Usia, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta kelompok masyarakat Kabupaten Batu Bara sangat diharapkan untuk ikut bersama-sama membantu dan memecahkan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Yaitu dengan memberikan usulan-usulan bersifat positif yang dapat mengurangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dapat mencapai sasaran yang tepat dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Musrenbang tingkat Desa
2. Musrenbang tingkat Kecamatan
3. Musrenbang Tingkat Kabupaten
4. Musrenbang Tingkat Provinsi
5. Informasi dari masyarakat, PSM, Orsos, Ormas serta instansi lain tentang permasalahan sosial yang terjadi
6. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
7. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Kementerian Sosial RI untuk melaksanakan kegiatan dan programnya di Kabupaten Batu Bara.

8. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepada pihak swasta, masyarakat, PSM, Ormas, Tagana dan Orsos dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan sosial.

Tabel 2.6

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara**

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
6,02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Batu Bara	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti program pemberdayaan	12 orang	
06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Jumlah PSKS yang mengikuti program pemberdayaan	12 orang	
06.02.2.03.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	
1.06.02.2.03.14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	
6,04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Batu Bara	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50%	
06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Batu Bara	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		
06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Batu Bara		200 orang	
06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Batu Bara	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	127 orang	
06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Batu Bara	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5161 orang	

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Batu Bara	Persentase PMKS Lainnya yang memperoleh bantuan sosial	50%	
06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Batu Bara	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	322 orang	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Batu Bara			
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara			
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Batu Bara		42 orang	
1.06.05.2.02.06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Batu Bara		1000 orang	
6,06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Batu Bara	Persentase masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	
06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Persentase masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	
06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Kab. Batu Bara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	
06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Jumlah Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	26 orang	
06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Batu Bara	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 orang	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Batu Bara	Persentase Terlaksananya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2.08.02.2.02.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Batu Bara	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara			
2.08.02.2.03.07	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara		3 Lembaga	
2.08.02.2.03.08	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara		12 Dokumen	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Batu Bara		40 keluarga	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara		40 orang	
2.08.04.2.02.07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara		1 lembaga	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Batu Bara	Jumlah Capaian Nilai Indikator Kabupaten Layak Anak	80%	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	1 lembaga	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada rganisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	15 organisasi	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026 secara mutlak menuntut adanya keselarasan strategis (*strategic alignment*) dengan arah kebijakan makro nasional. Hal ini krusial guna memastikan bahwa setiap alokasi program dan sub-kegiatan di tingkat daerah berkontribusi secara linear terhadap pencapaian target **RPJMN 2025–2029** serta agenda prioritas **Asta Cita**. Melalui analisis komparatif ini, Dinas Sosial PPPA memetakan dan mengadopsi tiga pilar kebijakan utama kementerian teknis tahun 2026 ke dalam dokumen perencanaan daerah.

1. Sinkronisasi pada sektor kesejahteraan sosial diarahkan untuk mendukung kebijakan Kementerian Sosial dalam penguatan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui pemutakhiran data kemiskinan ekstrem di lapangan, serta replikasi semangat program hulu seperti penanganan anak rentan putus sekolah.
2. Pada sektor pemberdayaan perempuan, Renja ini merespons secara aktif kebijakan Kementerian PPPA terkait percepatan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) yang diwujudkan melalui penguatan kelembagaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) lintas perangkat daerah demi menekan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
3. Dalam ranah perlindungan anak, penajaman program difokuskan pada pemenuhan standar pelayanan UPTD PPA berdasarkan mandat **Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2026**, yang didukung oleh optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik serta mitigasi eksploitasi anak. Melalui pendekatan kerangka logis ini, dokumen Renja 2026 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penganggaran rutin, melainkan bertransformasi menjadi dokumen kinerja yang akuntabel, terukur, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang selaras dengan prinsip-prinsip evaluasi SAKIP.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 adalah:

1. ***Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan Gender serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.***

Adapun Sasaran Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif.
2. Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak.
3. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Menurunnya Kemiskinan Dan Ketimpangan Gender Serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	10.68	10.50	10.34	10.16	9.99
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	1,08	1,10	1,12	1,14	1,16
		Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	84,26	84,46	84,66	84,86	85,06
				Indeks Ketimpangan Gender	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32
				Rasio Kekerasan Terhadap Anak	42:100000	40:100000	38:100000	36:100000	34:100000
Nilai Evaluasi AKIP Opd	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (73,00)	BB (75,00)	BB (77,00)	BB (79,00)	A (81,00)		

3.3. Usulan Program dan Kegiatan

Formulasi usulan program, kegiatan, dan sub-kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 merupakan manifestasi operasional dari hasil penyelarasan antara kebijakan nasional, evaluasi kinerja tahun lalu, dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum musrenbang. Rangkaian program yang diusulkan telah dikelompokkan secara tematik ke dalam kluster kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender, serta perlindungan hak

perempuan dan anak, guna memastikan intervensi pelayanan publik dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan efisien.

Pada klaster urusan sosial, usulan difokuskan pada penguatan jaminan dan rehabilitasi sosial melalui standardisasi pengelolaan data kemiskinan daerah yang terintegrasi secara nasional, serta peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui skema pemberdayaan ekonomi produktif yang mandiri. Sementara itu, pada klaster pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, usulan kegiatan diarahkan pada penguatan kelembagaan responsif gender lintas sektor serta akselerasi standardisasi UPTD PPA guna menjamin pelayanan penanganan korban kekerasan secara tuntas dan inklusif.

Berikut disampaikan usulan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Batu Bara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Batu Bara	100	6.210.823.423			100	6.374.513.612
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Batu Bara	9	18.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	20.000.000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Batu Bara	2	9.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	10.000.000
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Batu Bara	7	9.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		7	10.000.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Batu Bara	100	3.847.609.811	Dana Alokasi Umum (DAU)		100	4.010.000.000
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batu Bara	30	3.839.659.811	Dana Alokasi Umum (DAU)		30	4.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Batu Bara	1	7.950.000			1	10.000.000
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Batu Bara		110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			110.000.000
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Batu Bara	60	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		60	60.000.000
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Batu Bara	5	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		5	50.000.000
06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Batu Bara		768.550.000				768.550.000
06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Batu Bara	1	24.920.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	24.920.000
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Batu Bara	1	271.640.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	271.640.000
06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Batu Bara	1	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	45.000.000
06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Batu Bara	1	23.190.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	23.190.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Batu Bara	80	108.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		80	108.000.000
06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batu Bara	12	295.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	295.800.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batu Bara		72.960.000				72.960.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Batu Bara	1	72.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	72.960.000
06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batu Bara	12	1.005.623.612			12	1.005.623.612
06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Batu Bara	12	174.940.412	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	174.940.412
06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Batu Bara	12	830.683.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	830.683.200
06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batu Bara	12	387.380.000			12	387.380.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Batu Bara	1	38.420.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	38.420.000
06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Batu Bara	30	248.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30	248.960.000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Batu Bara	2	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	100.000.000
6,02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Soisal (PSKS) yang mengikuti program pemberdayaan	Kab. Batu Bara	12	601.471.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	601.471.000
06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti program pemberdayaan	Kab. Batu Bara	12	601.471.000			12	601.471.000
06.02.2.03.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	10	153.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	153.040.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
1.06.02.2.03.14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	12	288.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	288.000.000
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Batu Bara	12	160.431.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	160.431.000
6,04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Kab. Batu Bara	50	3.190.633.000			50	3.190.633.000
06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Kab. Batu Bara	50	2.138.738.000			50	2.138.738.000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	200	584.600.000			200	584.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	127	154.800.000	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		127	154.800.000
06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	5161	1.399.338.000	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		5161	1.399.338.000
06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya yang memperoleh bantuan sosial	Kab. Batu Bara	50	1.051.895.000			50	1.051.895.000
06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	322	1.051.895.000	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		322	1.051.895.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah anak terlantar dan fakir miskin yang dijangkau	Kab. Batu Bara		1.479.435.000				1.479.435.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang dijangkau	Kab. Batu Bara		1.479.435.000				1.479.435.000
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	42	137.928.000	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		42	137.928.000
1.06.05.2.02.06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	1000	1.341.507.000	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1000	1.341.507.000
6,06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat pkorban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Kab. Batu Bara	100	888.695.000			100	888.695.000
06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Kab. Batu Bara	100	264.830.000			100	264.830.000
06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	300	264.830.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300	264.830.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Kab. Batu Bara	26	623.865.000			26	623.865.000
06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	26	623.865.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26	623.865.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Terlaksananya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kab. Batu Bara	100	613.515.940			100	613.515.940
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	100	145.004.000			100	145.004.000
2.08.02.2.02.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Batu Bara	30	145.004.000	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		30	145.004.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapat bimbingan teknis, serta peningkatan kualitas SDM lembaga	Kab. Batu Bara		468.511.940				468.511.940
2.08.02.2.03.07	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Kab. Batu Bara	1	106.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	106.150.000
2.08.02.2.03.08	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Kab. Batu Bara	5	362.361.940	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		5	362.361.940
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase korban perempuan dan anak yang mendapatkan layanan sesuai standar	Kab. Batu Bara		261.410.200				261.410.200
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Kab. Batu Bara		261.410.200				261.410.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
2.08.04.2.02.07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Kab. Batu Bara	1	261.410.200	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1	261.410.200
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Capaian Nilai Indikator Kabupaten Layak Anak	Kab. Batu Bara	80	438.700.950			80	438.700.950
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Kab. Batu Bara	100	438.700.950			100	438.700.950
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada rganisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Batu Bara	15	438.700.950	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		15	438.700.950
	JUMLAH				13.684.684.513				13.848.374.702

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2026 melakukan 7 program, sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 - a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 1) Penyediaan Alat Bantu
 - 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - 1) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
4. PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - 2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Makanan
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
2. PROGRAM PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - a. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 - a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja ini memuat informasi tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun sebelumnya.

Adapun keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renja 2026 ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja 2026 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendatang.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2026 disusun, dengan harapan dapat terimplementasi dengan maksimal dan berhasil.

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara



Muliadi, SE
Pembina/ IV.a
NIP. 19750815 201001 1 018